

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Lombok Utara tidak termasuk Kabupaten yang menghitung Inflasi namun berperan sebagai penyumbang angka IHK, adapun yang menghitung inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya tiga daerah yaitu Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Kota Bima.

1. Bulan Oktober 2025 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M5 tidak masuk 10 Kabupaten/Kota yang menyumbang andil kenaikan IPH tertinggi se-indonesia dengan IPH sebesar 0,1 pada komoditi Daging Ayam, Cabai Rawit dan Beras, untuk mengatasi kenaikan IPH ini, TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring ke Pasar-pasar untuk memastikan kenaikan harga yang terjadi dan memastikan juga ketersediaan komoditi yang mengalami kenaikan pada minggu tersebut.
2. Bulan November 2025 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M2 tidak masuk 10 Kabupaten/Kota yang menyumbang andil penurunan IPH terdalam se-indonesia dengan IPH sebesar -1,1 pada Beras, Cabai Rawit, dan Daging Ayam Ras. Hal ini dipengaruhi juga dengan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan di 5 (lima) Kecamatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok strategis pada perayaan Natal dan Tahun Baru.
3. Bulan Desember 2025 andil IPH Kabupaten Lombok Utara pada M4 sebesar 6,19, berdasarkan dari data IPH bulan sebelumnya yaitu pada IPH bulan November M2 sebesar -1,1 pada Cabe Rawit, Bawang Merah dan Jeruk, terdapat adanya kenaikan, untuk mengatasi kenaikan IPH ini TPID Kabupaten Lombok Utara selalu melakukan monitoring perkembangan harga ke pasar-pasar untuk memastikan kenaikan harga yang terjadi dan memastikan juga ketersediaan komoditi yang mengalami kenaikan pada minggu tersebut.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan data IPH komoditas yang terpantau yaitu komoditas yang mengalami kenaikan salah satunya yaitu, cabai merah, beras dan cabai rawit. Komoditas cabai yg selalu mengalami kenaikan hal ini juga disebabkan seiring dengan faktor musiman yang terjadi pada bulan Oktober hingga November pada bulan Desember mengalami kenaikan harga karena menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang menyebabkan potensi penambahan konsumsi masyarakat sehingga menimbulkan peningkatan permintaan barang komoditas bahan pokok lainnya.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Lombok Utara pada Triwulan IV tahun 2025, TPID Kabupaten Lombok Utara terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K.

1. Keterjangkauan harga

Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis.

Melaksanakan kegiatan monitoring harga sembako dan komoditi strategis secara harian yang dilaporkan setiap minggu pada hari Rabu dengan sampling lokasi 3 (tiga) pasar yang ada di Kabupaten Lombok Utara yaitu Pasar Pemenang, Tanjung dan Gangga. Kegiatan monitoring tersebut dilakukan oleh enumerator dari Diskoperindag Kabupaten Lombok Utara dan di input ke Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) oleh kontributor.

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh TPID melalui Perangkat Daerah Teknis terkait.
3. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan juga telah menggelar kegiatan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah dengan menyalurkan Beras SPHP yang diselenggarakan di 5 (lima) Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara pada bulan November hingga Desember 2025 tentunya berkoordinasi juga dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagai upaya stabilisasi harga pasokan dan harga pangan pokok strategis Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Natal dan Tahun Baru (Nataru).
4. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak pada Bulan November s.d Desember 2025 yang bertujuan untuk pengendalian inflasi daerah.

1. Ketersediaan Pasokan

Sehubungan dengan Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Bulan Desember 2025 yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk tetap menjaga pasokan bahan pokok agar kebutuhan masyarakat tetap tersedia berkoordinasi dengan PERUM BULOG Kanwil Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan kegiatan operasi Pasar pada 5 Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara.

1. Kelancaran Distribusi

2. Secara akses jalan masih aman, apapun jenis kebutuhan kita dalam daerah itu defisit, kelancaran distribusi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga inflasi.
3. Kelancaran distribusi akses jalan yang memadai untuk selalu dipastikan, distribusi lancar dan harus selalu di pertahankan.
4. Telah disiapkan draf keputusan Bupati terkait pembentukan satgas pangan di daerah yang akan melaksanakan salah satu kegiatan pos pemantauan kendaraan logistik baik yang keluar dan yang masuk demi menjaga kelancaran arus distribusi.
5. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan akan dilaksanakan Rehabilitasi jalan produksi yang dapat dilalui kendaraan roda empat pada 5 Kelompok Tani dengan luas 1.250 m² (Sumber Anggaran DBHCHT 2025).

6. Komunikasi Efektif

7. Mengikuti kegiatan *zoom meeting* Rakor Nasional TPID seluruh Kabupaten/Kota dipimpin langsung Kemendagri RI dan dihadiri oleh beberapa narasumber yang dilaksanakan setiap minggu pada hari Senin.
8. Mengadakan rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara pada Bulan Juli 2025 dengan agenda langkah strategis TPID dalam penanganan inflasi.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Utara melaksanakan kegiatan High Level Meeting *Capacity Building* TPID yang melibatkan Kepala Desa Se-Kabupaten Lombok Utara di Senggigi Lombok Barat pada Bulan November 2025 dan Melaksanakan High Level Meeting Strategi Pengendalian Inflasi Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan pasokan Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Senggigi Lombok Barat pada Bulan Desember 2025.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kegiatan Pasar murah mampu menjaga stabilisasi harga pasokan dan harga pangan pokok strategis terutama pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) sehingga masyarakat dapat membeli dengan harga yang lebih murah.
2. Operasi pasar dalam rangka menjaga ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara, masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan tersebut, dibuktikan dengan hampir disemua Kecamatan stok barang yang dibawa oleh Perum BULOG selalu kehabisan dan akan terus berkoordinasi lebih lanjut dengan BULOG terkait kegiatan operasi pasar tersebut.
3. High Level Meeting Capacity Building TPID dan High Level Meeting Strategi Pengendalian Inflasi Daerah dalam Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan pasokan Kebutuhan Bahan Pokok Menjelang Perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bertujuan untuk merumuskan langkah konkrit pengendalian inflasi daerah sehingga harga kebutuhan bahan pokok akan lebih terjangkau.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Melaksanakan kegiatan operasi pasar secara berkesinambungan sehingga terjamin ketersediaan stok pangan di Kabupaten Lombok Utara.
2. Koordinasi dan sinergi antar Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau Perangkat Daerah Teknis terkait harus diperkuat sehingga terjalin dengan baik agar tidak terdapat jadwal kegiatan yang tumpang tindih pelaksanaannya.
3. Pentingnya Satgas Pangan di daerah sehingga pemantauan harga menjadi efektif dan efisien.
4. Membuat post pemantauan, agar logistik barang keluar masuk untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang, terutama dalam situasi darurat atau bencana, serta mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pos ini juga berperan dalam memantau pergerakan barang, mengelola stok, dan memastikan barang sampai tepat waktu dan aman ke tangan penerima.
5. Sinkronisasi dan koordinasi program kerja pengendalian inflasi jangka menengah maupun jangka panjang oleh masing-masing dinas terkait.
6. Bantuan alat dan mesin pertanian harus tetap di anggarkan dengan menambah volume, dikarenakan hal ini akan berdampak pada kecepatan tanam sehingga mengurangi biaya produksi dan harga lebih terjangkau.